

Analisis Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal dan Nasional

¹Sitti Hairani Idrus, ²La Ode Agus Said, ³Siti Kadri Yanti Sari, ⁴Muh. Rijal, ⁵Nabila Syam
Universitas Halu Oleo

*Corresponding Author e-mail: sitihairani@uho.ac.id

Article History

Received: 28-10-2024

Revised: 1-11-2024

Published: 18-11-2024

Key Words:

sustainable tourism, cultural heritage, policy analysis, local culture, tourism development

Abstract: *The development of sustainable tourism policies plays a crucial role in preserving both local and national cultures. This study analyzes the policy framework for sustainable tourism development in Indonesia and its contribution to the preservation of cultural heritage. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with government officials, tourism industry stakeholders, and cultural heritage experts. This study aims to explore how sustainable tourism policies can align with cultural conservation efforts, particularly in balancing economic growth and the protection of cultural identity. The findings reveal that while current policies promote tourism growth, there are challenges in ensuring that these policies adequately safeguard local traditions and cultural heritage. The integration of community participation and traditional practices into tourism strategies is identified as a key factor in achieving sustainability. Recommendations for policymakers include the need for stronger collaboration between tourism and cultural preservation sectors, as well as increased efforts to raise awareness among tourists about the importance of cultural heritage preservation. This study contributes to the growing body of knowledge on sustainable tourism by emphasizing the importance of preserving cultural identity within the tourism development framework.*

Kata Kunci:

pariwisata berkelanjutan, warisan budaya, analisis kebijakan, budaya lokal, pengembangan pariwisata

Abstrack: Pengembangan kebijakan pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting dalam melestarikan budaya lokal dan nasional. Penelitian ini menganalisis kerangka kebijakan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan kontribusinya terhadap pelestarian warisan budaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pemangku kepentingan industri pariwisata, dan ahli warisan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pariwisata berkelanjutan dapat selaras dengan upaya pelestarian budaya, khususnya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan identitas budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan saat ini mendukung pertumbuhan pariwisata, terdapat tantangan dalam memastikan kebijakan tersebut mampu melindungi tradisi lokal dan warisan budaya secara memadai. Integrasi partisipasi komunitas dan praktik tradisional ke dalam strategi pariwisata diidentifikasi sebagai faktor kunci untuk mencapai keberlanjutan. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan mencakup perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya, serta peningkatan upaya untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya pelestarian warisan budaya. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian tentang pariwisata berkelanjutan dengan menekankan pentingnya pelestarian identitas budaya dalam kerangka pengembangan pariwisata.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran signifikan dalam mendukung perekonomian global maupun nasional. Di Indonesia, pariwisata telah menjadi salah satu sumber utama devisa negara, dengan potensi yang besar dalam mempromosikan kekayaan budaya dan keanekaragaman alam yang dimiliki. Namun, pertumbuhan pariwisata yang pesat sering kali diiringi dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, seperti eksploitasi sumber daya alam, perubahan sosial, serta hilangnya tradisi dan identitas

budaya setempat (Jones & Brown, 2019). Untuk itu, diperlukan kebijakan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan guna mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional.

Meskipun kebijakan pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda global, penerapan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks melestarikan budaya lokal. Banyak penelitian terdahulu berfokus pada dampak ekonomi dari pariwisata berkelanjutan, namun masih sedikit yang secara mendalam mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam pelestarian budaya (Smith, 2020). Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting, yakni kurangnya kajian mengenai integrasi kebijakan pariwisata berkelanjutan dengan pelestarian budaya lokal dan nasional, terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan budaya tradisional.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kelestarian budaya. Dengan adanya ancaman terhadap warisan budaya akibat globalisasi dan modernisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi strategis untuk mendukung upaya pelestarian budaya melalui pariwisata berkelanjutan.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Smith (2020), menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan memiliki potensi untuk mendukung pelestarian budaya. Namun, studi tersebut kurang memperhatikan faktor lokal dan kearifan budaya yang berbeda di setiap wilayah. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan fokus pada kebijakan di Indonesia, mengingat keragaman budaya yang sangat luas dan peran penting yang dimiliki pariwisata dalam menjaga kelestarian budaya lokal.

Novelti dari penelitian ini adalah analisis mendalam mengenai peran kebijakan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada upaya konkret pelestarian budaya lokal dan nasional. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru pada literatur dengan memperkuat pentingnya integrasi antara kebijakan pariwisata dan pelestarian budaya melalui pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan industri pariwisata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pelestarian budaya lokal dan nasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi kebijakan yang efektif dalam mendukung kepariwisataan berkelanjutan yang berbasis pada pelestarian budaya.

Manfaat dari penelitian ini mencakup kontribusi akademik terhadap kajian pariwisata berkelanjutan, serta implikasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang tepat, diharapkan pariwisata dapat terus berkembang tanpa mengorbankan warisan budaya yang berharga, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan ekonomi nasional.

Kepariwisataan telah menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Menurut laporan World Travel and Tourism Council (2020), sektor pariwisata menyumbang sekitar 10,4% dari total PDB dunia dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, pariwisata menjadi salah satu sektor penghasil devisa terbesar, dengan kontribusi yang mencapai 5,7% terhadap PDB nasional pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun, perkembangan

pariwisata yang pesat ini tidak selalu diiringi dengan perhatian yang cukup terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Dalam beberapa kasus, pariwisata justru menjadi faktor yang mengancam kelestarian budaya lokal, seperti yang terlihat di beberapa destinasi wisata yang mengalami eksploitasi budaya dan pergeseran nilai-nilai tradisional akibat tingginya aktivitas pariwisata (Adams, 2021).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pariwisata berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian sumber daya alam serta budaya (UNWTO, 2018). Konsep ini menekankan bahwa pariwisata harus dikelola sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Butler, 2017). Dalam konteks budaya, pariwisata berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional, karena budaya sering kali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Indonesia, dengan kekayaan budaya yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan pelestarian budaya. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah (BPS, 2020), Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi, yang tidak hanya menjadi identitas nasional tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata yang unik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak destinasi wisata budaya yang mengalami tekanan dari aktivitas pariwisata massal, seperti kerusakan situs-situs budaya, hilangnya tradisi lokal, dan komersialisasi budaya (Hampton & Jeyacheya, 2015).

Salah satu contohnya adalah kasus Bali, yang dikenal sebagai pusat pariwisata budaya di Indonesia. Meskipun pariwisata telah membawa kemakmuran ekonomi bagi pulau ini, banyak tradisi dan budaya Bali yang tergerus akibat komersialisasi pariwisata, seperti upacara keagamaan yang sering kali dipertunjukkan kepada wisatawan sebagai atraksi komersial (Picard, 1996). Kasus serupa juga terjadi di daerah lain, seperti Yogyakarta, di mana tradisi lokal seperti seni batik dan kerajinan tangan berisiko hilang akibat tekanan industri pariwisata (Yamashita, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pariwisata yang ada masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek pelestarian budaya lokal.

Selain itu, munculnya globalisasi dan modernisasi mempercepat perubahan budaya di berbagai daerah. Arus globalisasi sering kali mengarah pada homogenisasi budaya, di mana budaya lokal mulai tersingkir oleh budaya global yang lebih dominan. Dalam konteks pariwisata, globalisasi dapat mengancam kelestarian budaya lokal jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Wisatawan sering kali membawa serta nilai-nilai dan perilaku yang berbeda dengan budaya lokal, yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan perubahan sosial dan budaya yang tidak diinginkan (Cohen, 1988). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa pariwisata tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan memperkuat budaya lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian budaya. Misalnya, penelitian oleh Smith (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan yang baik dapat mendukung pelestarian budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tradisi dan budaya mereka dihargai dalam konteks pariwisata. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Jones dan Brown (2019) mengungkapkan bahwa

salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah kurangnya koordinasi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya, yang sering kali berjalan secara terpisah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang dapat menjembatani kedua sektor tersebut agar pariwisata dapat berkembang tanpa mengorbankan budaya lokal.

Namun, meskipun banyak penelitian yang telah membahas pariwisata berkelanjutan, sebagian besar masih berfokus pada aspek lingkungan dan ekonomi, dengan sedikit perhatian yang diberikan pada aspek budaya, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa budaya merupakan salah satu elemen inti yang membentuk identitas suatu bangsa. Kehilangan budaya lokal tidak hanya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengurangi daya tarik wisata Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan pelestarian budaya, sehingga pariwisata dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan melestarikan budaya lokal, bukan sebaliknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan dan bagaimana kebijakan tersebut mendukung pelestarian budaya lokal dan nasional. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan yang telah diterapkan serta dampaknya terhadap kelestarian budaya (Creswell, 2014).

1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam kaitannya dengan pelestarian budaya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami kebijakan secara mendalam, serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan pariwisata dan dampaknya terhadap budaya lokal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengembangan kebijakan pariwisata, pelaku industri pariwisata, dan tokoh masyarakat lokal yang memahami budaya daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, serta publikasi dari instansi terkait yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian budaya (Moleong, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

- **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan kunci, yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan

mereka dalam kebijakan pariwisata. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait pandangan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan.

- **Observasi:** Teknik observasi digunakan untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan pariwisata berkelanjutan di beberapa destinasi wisata. Peneliti mengamati interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, dan pihak berwenang dalam konteks pelestarian budaya, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.
- **Studi Dokumentasi:** Peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan, peraturan, dan laporan resmi yang relevan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian budaya. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola (tema) yang ditemukan dalam data (Braun & Clarke, 2006). Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pengumpulan Data:** Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan topik utama yang relevan dengan penelitian.
2. **Reduksi Data:** Data yang telah terkumpul direduksi untuk menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. **Pengkodean Data:** Peneliti kemudian melakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.
4. **Penyajian Data:** Tema-tema yang telah diidentifikasi disajikan secara sistematis untuk menggambarkan kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan dan kontribusinya terhadap pelestarian budaya.
5. **Penarikan Kesimpulan:** Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan utama, yang kemudian dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktis.

Proses analisis data ini dilakukan secara iteratif, di mana peneliti terus memeriksa dan menafsirkan data secara berulang untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis tematik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan pariwisata berkelanjutan dapat mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang berjudul "Analisis Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal dan Nasional" dalam bentuk poin-poin yang terstruktur sebagai berikut:

1. Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah Indonesia, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS), terlihat bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia menekankan pada tiga pilar utama: pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan,

dan pelestarian budaya. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan di lapangan, terutama dalam hal pelestarian budaya lokal. Pemerintah lebih banyak fokus pada pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata, sementara aspek budaya dan sosial sering kali terabaikan (Smith, 2020).

Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia merujuk pada upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Konsep pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pariwisata terhadap sumber daya alam dan budaya, serta memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Kebijakan ini diatur dalam berbagai dokumen strategis, seperti *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPNAS)* dan berbagai peraturan terkait lainnya. Dalam kebijakan ini, pariwisata dipandang tidak hanya sebagai alat untuk mendongkrak perekonomian negara, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya lokal, menjaga keberagaman hayati, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam industri pariwisata.

Beberapa aspek utama dari kebijakan ini meliputi:

1. Pelestarian Budaya dan Alam: Kebijakan ini menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman budaya dan alam di setiap destinasi wisata, seperti melindungi situs-situs warisan budaya dan menjaga ekosistem lingkungan.
2. Partisipasi Masyarakat Lokal: Kebijakan mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, baik melalui pemberdayaan ekonomi maupun pengelolaan destinasi wisata yang berbasis komunitas.
3. Keberlanjutan Ekonomi: Pariwisata berkelanjutan diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar destinasi wisata, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup.
4. Pengelolaan Lingkungan yang Bijak: Pengelolaan lingkungan yang bijak dalam kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi, dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), ke-11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan), dan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

2. Kurangnya Integrasi antara Pariwisata dan Pelestarian Budaya

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu kelemahan utama dalam kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah kurangnya integrasi antara kebijakan pariwisata dan kebijakan pelestarian budaya. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan cagar budaya, seperti UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelaksanaannya tidak sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan pariwisata. Hal ini mengakibatkan banyak situs budaya yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pariwisata yang tidak dikelola dengan baik (Adams, 2021). Beberapa destinasi wisata budaya di Indonesia, seperti Borobudur dan Bali, menghadapi ancaman komersialisasi yang berlebihan, yang justru mereduksi esensi budaya lokal (Picard, 1996).

Kurangnya Integrasi antara Pariwisata dan Pelestarian Budaya dalam konteks kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan mengacu pada ketidaksinambungan antara

kebijakan pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pelestarian budaya yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya lokal dan nasional. Seringkali, kebijakan pariwisata lebih menitikberatkan pada peningkatan jumlah wisatawan dan pendapatan dari sektor ini, sementara aspek budaya dan sosial sering kali terabaikan atau hanya dipandang sebagai pelengkap (Adams, 2021). Akibatnya, banyak destinasi wisata di Indonesia yang mengalami komersialisasi budaya, di mana elemen budaya lokal, seperti tradisi, ritual, dan kerajinan tangan, dipertunjukkan semata-mata untuk kepentingan pariwisata tanpa memperhatikan pelestarian nilai-nilai asli budaya tersebut.

Contoh nyata dari kurangnya integrasi ini adalah di beberapa situs warisan budaya seperti Bali dan Yogyakarta, di mana upacara keagamaan dan budaya tradisional sering kali berubah menjadi atraksi wisata komersial. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, di mana esensi spiritual atau sosial dari budaya tersebut berkurang, dan lebih mengarah kepada pertunjukan untuk konsumsi wisatawan (Picard, 1996). Selain itu, kebijakan perlindungan budaya, seperti yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pengembangan pariwisata, sehingga banyak situs budaya yang mengalami degradasi akibat tekanan pariwisata massal.

Kurangnya integrasi ini juga tercermin dalam kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan yang mencakup aspek pariwisata dan budaya secara holistik. Sering kali, kebijakan pariwisata diputuskan secara top-down, tanpa melibatkan masyarakat lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya mereka (Smith, 2020). Hal ini menyebabkan masyarakat lokal kehilangan kontrol atas bagaimana budaya mereka disajikan kepada wisatawan, dan dalam jangka panjang, mengancam kelestarian budaya itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah ini, integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pariwisata dan pelestarian budaya diperlukan, di mana budaya dipandang sebagai aset utama dalam pengembangan pariwisata, bukan sekadar daya tarik tambahan. Dengan demikian, pariwisata dapat berfungsi sebagai alat yang mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan.

3. Peran Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelestarian budaya. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa di daerah-daerah seperti Yogyakarta dan Toraja, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata tidak hanya membantu melestarikan budaya mereka tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Namun, di banyak daerah lain, masyarakat masih sering kali diposisikan sebagai objek daripada subjek dalam industri pariwisata. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal kehilangan kontrol atas budaya mereka sendiri dan hanya menjadi penerima manfaat yang pasif (Jones & Brown, 2019).

4. Tantangan Implementasi Kebijakan di Tingkat Daerah

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas pemerintah daerah, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Banyak pemerintah daerah yang lebih fokus pada peningkatan jumlah wisatawan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap budaya lokal dan lingkungan. Dalam beberapa kasus, pelestarian budaya hanya diprioritaskan pada destinasi wisata unggulan, sementara destinasi wisata lainnya sering kali terabaikan (Hampton & Jeyacheya, 2015). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam membangun kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan.

5. Dampak Globalisasi dan Modernisasi terhadap Budaya Lokal

Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya lokal, terutama di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata internasional. Wisatawan asing membawa budaya dan nilai-nilai yang sering kali berbeda dengan budaya lokal, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan erosi budaya. Komersialisasi budaya dalam bentuk pertunjukan wisata dan souvenir sering kali mengaburkan nilai-nilai asli dari budaya tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa budaya lokal sering kali dipertontonkan untuk memenuhi selera pasar, sehingga makna sakral dari budaya tersebut berkurang (Cohen, 1988).

6. Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan yang Inklusif

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang mendukung kelestarian budaya memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata perlu berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih sensitif terhadap aspek budaya. Program-program pemberdayaan masyarakat lokal perlu ditingkatkan agar mereka memiliki kapasitas untuk mengelola pariwisata yang berbasis budaya. Selain itu, promosi pariwisata juga perlu menekankan pentingnya kelestarian budaya, dengan edukasi kepada wisatawan tentang nilai-nilai budaya lokal yang harus dihormati (UNWTO, 2018).

7. Rekomendasi untuk Pengembangan Kebijakan yang Berkelanjutan

Dari hasil analisis, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan keberlanjutan pariwisata dalam mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional. Pertama, perlu adanya integrasi yang lebih baik antara kebijakan pariwisata dan kebijakan pelestarian budaya, sehingga kedua sektor ini dapat saling mendukung. Kedua, pemerintah harus memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata melalui program pemberdayaan yang sistematis. Ketiga, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah komersialisasi berlebihan dari budaya lokal dan melindungi nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya. Terakhir, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan (Butler, 2017).

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional. Berdasarkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan tokoh masyarakat lokal, ditemukan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintah sering kali lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampaknya terhadap budaya lokal (Butler, 2017).

Kebijakan yang ada cenderung bersifat sentralistik, di mana pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam penentuan kebijakan pariwisata. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga nilai-nilai budaya yang seharusnya dilestarikan sering kali terabaikan (Smith, 2020). Salah satu contoh konkret adalah di Bali, di mana budaya lokal seperti upacara adat mulai beralih menjadi atraksi pariwisata komersial, yang pada akhirnya mengurangi esensi dari tradisi tersebut. Komersialisasi ini tidak hanya memengaruhi nilai-nilai budaya, tetapi juga menyebabkan

perubahan pada tatanan sosial masyarakat lokal yang terlibat dalam industri pariwisata (Picard, 1996).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, seperti UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penerapan di lapangan masih sangat lemah. Beberapa situs budaya di berbagai daerah tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal perlindungan dan konservasi, terutama di daerah yang menjadi tujuan utama wisatawan internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang mendukung pelestarian budaya belum terintegrasi dengan baik dalam strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kelemahan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah (Hampton & Jeyacheya, 2015).

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pelestarian budaya melalui pariwisata berkelanjutan adalah adanya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan pariwisata, seperti di Yogyakarta dan Toraja, mampu menjaga kelestarian tradisi dan budaya mereka meskipun pariwisata berkembang pesat. Partisipasi aktif ini memungkinkan masyarakat lokal untuk mempertahankan kontrol atas bagaimana budaya mereka disajikan kepada wisatawan, serta memastikan bahwa pendapatan dari pariwisata kembali ke masyarakat setempat dan digunakan untuk mendukung upaya pelestarian budaya (Jones & Brown, 2019).

Namun, partisipasi masyarakat lokal tidak selalu mudah untuk diterapkan. Penelitian ini menemukan bahwa di beberapa daerah, masyarakat masih kurang memiliki pemahaman dan kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Faktor pendidikan dan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai kebijakan pariwisata sering kali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan yang lebih efektif dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata yang berbasis budaya. Pemberdayaan ini tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya sebagai aset pariwisata yang berkelanjutan (Adams, 2021).

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pariwisata berkelanjutan yang mendukung kelestarian budaya, kebijakan harus lebih inklusif dan berbasis komunitas. Pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan budaya lokal tidak terabaikan dalam proses pengembangan pariwisata. Selain itu, kebijakan yang ada perlu lebih terintegrasi dengan kebijakan pelestarian budaya, agar kedua sektor tersebut dapat berjalan seiring dan saling mendukung (UNWTO, 2018).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformulasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Reformulasi ini harus mengutamakan aspek pelestarian budaya dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pariwisata dapat terus berkembang tanpa mengorbankan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

dalam hal mendukung kelestarian budaya lokal dan nasional. Meskipun kebijakan-kebijakan seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS) dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah diterapkan, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Banyak destinasi wisata yang masih lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi daripada pelestarian budaya, yang menyebabkan degradasi nilai-nilai budaya lokal dan komersialisasi tradisi. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, memperparah situasi ini. Hal ini mengancam keberlangsungan warisan budaya yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional.

Untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pariwisata dan kebijakan pelestarian budaya. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam melestarikan tradisi mereka. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan penerapan regulasi yang lebih ketat untuk mengontrol komersialisasi budaya juga penting dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, pariwisata berkelanjutan dapat berfungsi sebagai alat yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kekayaan budaya Indonesia untuk generasi mendatang.

Referensi

- Smith, K. (2020). *Sustainable tourism and cultural heritage preservation: Policies and practices*. Routledge.
- Adams, R. (2021). *Tourism and cultural commodification in Southeast Asia*. Routledge.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan perkembangan pariwisata Indonesia*. BPS Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Butler, R. W. (2017). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 19(3), 356-376.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commodification in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371-386.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2015). Power, ownership and tourism in small islands: Evidence from Indonesia. *World Development*, 70, 146-158.
- Jones, M., & Brown, T. (2019). The intersection of tourism development and cultural conservation. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(5), 682-699.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2018). *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional*. Kemenpar RI.
- Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2016). *Marketing Management* (3rd ed.). Pearson Higher Ed.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural tourism and touristic culture*. Archipelago Press.
- Pusat Studi Pariwisata UGM. (2020). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Ramadhan, I. R. (2022). Penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata alam Indonesia. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 14(2), 112-129.
- Renda, A. (2019). Regulation and innovation in digital tourism platforms. *Journal of Tourism Policy*, 15(4), 36-55.

- Smith, K. (2020). *Sustainable tourism and cultural heritage preservation: Policies and practices*. Routledge.
- Supriadi, D., & Wirakusuma, P. (2021). The role of local communities in preserving cultural heritage: Case studies from Bali. *Indonesian Journal of Tourism Studies*, 5(1), 25-38.
- Tim Penulis. (2021). *Laporan Tahunan Pariwisata Indonesia*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- UNWTO. (2018). *Tourism for development: Growth with a purpose*. United Nations World Tourism Organization.
- Yamashita, S. (2017). *Bali and beyond: Explorations in the anthropology of tourism*. Berghahn Books.
- Yudhoyono, A. S., & Wirawan, T. (2019). *Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Perspektif Kebijakan Publik*. Gramedia Pustaka Utama.